DAFTAR PUSTAKA

Skripsi dan Jurnal

Al' anam, M. (2025). Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch : Hubungan Moral Dan Hukum. *Jurnal Humaniora*, *9*(1), hal. 119-133.

Aminoto, K. A. (2016). *Redistribusi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945*. Universitas Gajah Mada.

Asyrofi, M. H. (2021). *Syarat Hakim Menurut Al-Mawardi dan Hakim Profesional*. Pengadilan Agama Purwodadi.

Aziz, A. S. (2016). Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, *2*(2), hal. 293-295.

Bawangun, A. (2014). Pertanggungjawaban Kode Etik Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana. *Lex Crimen*, *3*(2).

Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, *4*(2), hal. 50-67.

Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Essai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal Of Judicial Review*, *24*(2), hal. 289-304.

Dwi, R., Puspitaningtyas, A., & Jaang, S. (2026). Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Dalam Kasus Suap Eks Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst). *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, *18*(1), hal. 34.

Erlita, H., Zai, S., Sri, C., Pertiwi, R., Aplikasi, J., Hia, S., Mardliyah, A., Naibaho, J. L., & S, H. B. P. (2025). Menganalisis Kasus Ronald Tannur 2023 Terhadap Hukum dan HAM. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(6), hal. 132-139.

Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, *2*(1), hal. 36-17.

Faiz, A. (2019). *Etika Immanuel Kant: Etika Deontologis dan Imperatif Kategoris*.

UIN Sunan Ampel.

Farbadi, M. P., Sianturi, M. S., & Setiawan, S. M. (2025). Pelanggaran Etika dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur : Analisis Kritis terhadap Integritas Penegakan Hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, *2*(6), hal. 128-134.

Ferdika, A. F., & Latua, A. (2022). Kedudukan Kejaksaan di Indonesia : Perspektif Fiqih Siyasah. *AS-SIYASI: Journal Of Constitutional Law*, *2*(1).

Gozali, F., Mei, D., & Sianturi, R. (2024). Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas dan Akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023). *Iblam Law Review*, *4*(6), hal. 53-56.

Hasanah, U. (2025). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Etika dan Keadilan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 454/Pid. B/2024/PN. Sby. (Tentang Penganiayaan)*. UIN Kiai Ageng Muhammad Besari.

I Gusti Ngurah Oka Setiawan dan Asmawati. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair dalam Sistem Peradilan. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, *4*(1), hal. 34-46.

Ismail, M. (2018). Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *1*(1), hal. 99.

Junaidi, Surahmi, M., Zaimah, Merta, M., & Akbar, T. N. (2022). Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Berkualitas Dari Judicial Corruption. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *1*(10).

Kelvin, A., Pakpahan, F., Fitrianto, B., Nasution, N. S., & Nasution, A. R. (2025). Implementasi Asas Fair Trial dan Open Justice dalam Legal Memorandum dan Eksaminasi sebagai Sarana Pengawasan Akuntabilitas Hakim. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial , Politik Dan Humaniora*, *4*(1), hal. 497-510.

Lala Lamanda. (2022). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kedudukan Hakim dalam Menjaga Indepedensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*. UIN Datokarama Palu.

Lestiani, L., & Yusuf, H. (2025). Analisis Kasus Suap terhadap Tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya : Dampak terhadap Integritas Peradilan di

Indonesia. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *2*(6).

Makbul, M. (2011). *Analisis Fikih Siyasah Terhadap Pengawasan Pelanggaran Etika Perilaku Hakim Menurut UU NO. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Manik, L. R. B., Kalalo, F. P., & Poodang, A. H. (2021). Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan hakim dan Pelaksanaan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. *Lex Administratum*, *IX*(2), hal. 91-99.

Marsanthy, T. A. (2025). Dampak Pelanggaran Etika Hakim: Studi Kasus Pelanggaran Etika Oleh Hakim PN Rangkasbitung. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *13*(12).

Marzuki, S., Hukum, F., & Islam, U. (2015). Pengadilan yang Fair : Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, *22*(3), hal. 394-419.

Muhit, R. A. (2023). Peran Kode Etik Hakim Profesi Kehakiman Terhadap Pertanggungjawaban Hakim Dalam Memutus Perkara di Pengadilan. *Lex Laguens*, *1*(1), hal. 17-22.

Prastiwi, T. O., & Firmantoro, Z. A. (2026). Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim dan Sanksi Disiplin Berdasarkan Putusan Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2023. *Jurnal Hukum Sasana*, *12*(1), hal. 223-239.

Putri, A. M. M. (2016). Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik Berpotensi Pidana. *Jurnal Hukum*.

Rawls, J. (1980). Kantian Constructivism in Moral Theory. *The Journal of Philosophy*, *77*(9), hal. 524-525.

Reynaldo Tampi. (2021). Prinsip Yang Adil Dalam Sistem Peradian Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, *10*(7).

Rizky, G. A. et al. (2025). Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, *2*(2), hal. 20-31.

Rohman, A. (2022). *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil karena Korupsi*. UIN Kiai Haji Achmad

Siddiq.

Rudiyansah, M. M. D. H. (2024). Pelanggaran Etika dan Integritas Hakim : Tinjauan terhadap Efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial. *Abdurrauf Law and Sharia*, *1*(2), hal. 139-163.

Saputra, E. M. dan Z. R. (2024). Penerapan Asas Fair Trial Dalam Persidangan Kasus Pencemaran Nama Baik. *Sumbang 12 Journal*, *02*(02), hal. 56-65.

Saputri, F. I. (2024). *Integrasi Peradilan Hukum Dengan Peradilan Etik Perspektif Konsep Kekuasaan Kehakiman dan Siyasah Qadhaiyyah*. IAIN Kediri.

Sari, M., Karim, Z. P., Armia, M. S., Syariah, F., Islam, U., & Uin, N. (2023). Analisis Siyasah Qadha'iyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. *JPHTN-HAN*, *2*(3), hal.37-62.

Soraya, J. dan S. A. I. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Atas Hak Fair Trail Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Indonesia*.

Sudirman, A. (2020). *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*. UIN Raden Intan Lampung.

Tobu, E., Mabilani, G. M., & Witarti Rabawati, D. (2024). Penegakan Kode Etika Profesi Hakim Konstitusi. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, *2*, hal. 78-87.

Wahyu, A. (2025). Analisis Hukum dan Etika Profesi Hakim Mengenai Kasus Hakim Ronald Tannur Studi Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Dan Multidisiplin*, *2*(4), hal. 91-109.

Web dan Berita

Al-Mawardi. (n.d.). *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (p. hal. 129).

Asyrofi, M. H. (2021). *Syarat Hakim Menurut Al-Mawardi dan Hakim Profesional*. Pengadilan Agama Purwodadi.

Dorimulu, P. (2026). *Kuasa Hukum Nadiem Laporkan Majelis Hakim, Soroti Dugaan Pelanggaran "Fair Trial" di Tipikor*. Investortrust.

Ernowo, P. Y. (2025). *Hakim Ad Hoc PHI Medan Dipecat tidak Hormat, Terbukti*

Terima Uang dari Pihak Berperkara. Portal Berita Info Publik.

Kedudukan Hakim dalam Islam. (n.d.). Replubika

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2024). *Siaran Pers Resmi No. PR – 892/104/K.3/Kph.3/10/2024 tentang Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Suap/Gratifikasi Hakim PN Surabaya*.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2013). *Bunga Rampai Etika dan Pedoman Perilaku Hakim*. Komisi Yudisial RI.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2019). *Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Komisi Yudisial RI.

Mahkamah Agung RI. (2024). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023*. Mahkamah Agung RI.

Masputra, M. H. C. (2025). *Evolusi Peran Hakim dalam Sejarah Islam dan Sifat Manusiawinya*. Mahkamah Agung.

Panduan Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas Hakim (p. hal. 11). (2022). Lembaga Kajian dan advokasi independen peradilan.

PBB, M. U. (1948). *Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia* (Issue 3, p. hal. 3).

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. (n.d.). Jdih. Kemenkeu.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi Nomor 1465 K/Pid/2024 dalam perkara atas nama terdakwa Gregorius Ronald Tannur. (n.d.).

Qur'an NU Online. (n.d.-a). *QS. Al-Maidah [5]:8*. https://quran.nu.or.id/al-maidah#8

Qur'an NU Online. (n.d.-b). *QS. Shad [38]:26*. https://quran.nu.or.id/shad#26

Sahbani, A. (2012). *Achmad Yamanie Dipecat*. Hukum Online.

Siaran Pers Resmi Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2024). *KY Rekomendasikan Sanksi Pemberhentian Tetap dengan Hak Pensiun Terhadap Tiga Hakim Kasus Ronald Tannur*. Jakarta: Komisi Yudisial.

Sub Bagian Perencanaan, T. I. dan P. (n.d.). *Kode Etik Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa*.

Syafaruddin, M. (2024). Komisi Yudisial Rekomendasikan Sanksi Pemecatan pada Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur. *Suara Surabaya.Net*.

Yandwiputra, A. R. (2025). *Tiga Hakim Penerima Suap Vonis Lepas CPO Divonis 11 Tahun Penjara dan Denda Rp. 500 Juta*. Tempo.

Yudisial, K. (2025). *KY Usulkan 25 Hakim Dijatuhi Sanksi Pada Januari Hingga April 2025*. Jakarta: Komisi Yudisial.

Zakaria, M. (2019). *Peradilan Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fiss Siyasah Assyar'iyyah)*. Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Buku

Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jus VI). Dar al-Fikr.

Audah, A. Q. (1992). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Jus II). Muassasur Risalah.

Asshiddiqie, J. (2013). *Menegakkan Etika Profesi Hukum dan Menjaga Keluhuran Martabat Hakim*. Komisi Yudisial RI.

Asshiddiqie, J. (2021). *Etika Konstitusi dan Peradilan: Penegakan Etika dan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2016). *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori hans kelsen tentang hukum*. Setjen dan Kepaniteraan MK-RI.

Elza, F., Muslih, M., Sahlul, Azhar, I., Mushafi, Z., & Razaq, A. (2013). *Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*. Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Harahap, Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.

Khallaf, A. W. (1977). *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Dar al-Ansar.

Kaligis, O. C. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Alumni.

Kant, I. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals, terj. Mary Gregor*. Cambridge: Cambridge University Press.

Manan, A. (2016). *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*. Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.

Mertokusumo, S. (2011). *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia*. Maha Karya.

Santoso, T. (2018). *Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*. Rajawali Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.

Suseno, F. M. (1992). *Etika Umum*. Gramedia Pustaka Utama.

Perundang-undangan

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). (n.d.).

Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (n.d.).

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan jaminan perlindungan bagi hakim sepanjang bertindak dalam koridor pelaksanaan tugas peradilan secara sah. (n.d.).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. (n.d.).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. (n.d.).

Peraturan Bersama MA-KY No. 02/PB/MA/IX/2012_ No. 02/PB/P.KY/IX/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. (n.d.).

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 KUHP. (n.d.).

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (n.d.).

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Political Right. (n.d.).